INOVASI DI SEKTOR PUBLIK

Fransisca Mulyono

Abstract

Public sector innovation in current globalization era is inevitably a global phenomenon. This situation is supported by experiences of countries which try to focus themselves to achieve an innovation-driven economy to serve a better service for their 'customers' beside to occupy an important position in global rank. Several countries acknowledging innovation as of great importance in achieving competitive advantages. The perfect examples for this are China and India which are considered experiencing a rapid growth– leapfrogging – to become great powers in Asia. This paper has three major purposes. First, it tries to describe the importance of public sector innovation to raise its competitive advantage. Although innovation in public sector is a complex one, but it is not impossible to be attained. Second, to give some public sector innovation's universal lessons to be learnt by countries which focusing on innovation since it is applied for more than two decades in the world. Third, to describe some limitations to be confended and anticipated in order to raise the responsiveness of public sector to this global trend.

Keywords: *public sector, inovation*

I. PENDAHULUAN

Inovasi dalam sektor publik sebenarnya bukan hal baru. Secara historis ia dimulai pada tahun 1980an di Inggris ketika Margaret Tatcher menjadi Perdana Menteri dan konsep ini terkenal dengan sebutan *reinventing Government* atau dibeberapa tempat dikenal sebagai *New Public Management.* Setelah dua dekade, perhatian akan inovasi dalam sektor publik kembali menjadi fokus setelah dunia mengalami globalisasi dengan ditandai kemunculan teknologi informasi dan komunikasi yang secara khusus telah merubah drastis banyak bisnis dan kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Secara umum disadari bahwa inovasi akan membawa dampak positif bagi tingkat makro, yaitu mengembangkan tingkat pertumbuhan perekonomian

sebuah negara, meningkatkan daya kompetisi, keamanan negara, penciptaan kemakmuran dan standar hidup masyarakat sebuah negara.[1] Menurut Porter et.al., berdasarkan penelitian kinerja ekonomi yang dilakukan melalui perbandingan antar negara ada hubungan yang positif antara intensitas aktivitas inovasi nasional kepada pertumbuhan produktivitas dan standar hidup yang lebih tinggi[2] : melalui inovasi, perusahaan privat yang sukses akan menghasilkan produk baru, menciptakan segmen baru dan menghasilkan *customer value* akan menghasilkan profit dan pangsa pasar lebih besar. Ketika perusahaan kompetitor menyerap inovasi baru, maka akan muncul *spillover effect.* Ketika inovasi diadopsi dan didifusikan dalam masyarakat, *knowledge stock* negara akan terakumulasi dan memberikan fondasi bagi pertumbuhan produktivitas, penciptaan kemakmuran jangka panjang dan standar hidup yang lebih tinggi. Departemen Pariwisata, Pembangunan Regional dan Industri Queensland mengatakan bahwa inovasi merupakan pendorong utama bagi pembangunan ekonomi dan sosial di semua masyarakat modern.[3]

Borderless state atau lebih tepat disebut sebagai *borderless world* memunculkan banyak sekali kemudahan dalam berbisnis bagi perusahaan maupun negara di satu sisi, tetapi di sisi lain memunculkan banyak rintangan yang harus dihadapi para pihak, antara lain persaingan yang terjadi semakin intens. Sering kita lihat bahwa persaingan yang terjadi bukan hanya dilevel mikro, dalam pengertian antara sesama perusahaan, tetapi juga mencakup persaingan tingkat makro dan global, yaitu persaingan antara negara dengan negara, bahkan antara perusahaan multi nasional dengan negara. *Competitive advantage* saat ini menjadi konsep penting bagi banyak negara, karena dengannya ia bisa menjadi terdiferensiasikan dari negara-negara lainnya, khususnya negara-negara sedang berkembang dengan dimilikinya antara lain tenaga kerja murah disamping berlimpahnya sumber daya alam. *Competitive advantage* yang dibarengi dengan upaya meningkatkan pendidikan, landasan lapangan pekerjaan dan pengetahuannya terbukti memampukan China muncul menjadi salah satu negara ekonomi besar dunia saat ini. Bahkan Goldman Sachs – bank investasi global terkenal – meramalkan bahwa China bersama dengan Brasil, Rusia dan India (dikenal dengan "perekonomian BRIC") akan

---

[1] George Bougias [and] Anand Kulkarni, *Rethinking Public Support of Science and Innovation in the National Interest : An Innovation Architecture Approach, submission to the Productivity Commission on the issue of Public Policy Support for Science and Innovation in Australia,* 2006, p. 2. Lihat juga Innovation Vital Signs, *Defining "Innovation" : A New Framework to Aid Policymakers,* 2006 , p. 2.

[2] Ibid.

[3] The Department of Tourism, Regional Development and Industry, *Queensland Government Submission to the National Innovation Review,* April 2008, p. 2.

mampu meningkatkan output perekonomian global dan bisa menyusul perekonomian G6 di tahun 2040.[4] Ketakutan akan China sebagai sebuah kekuatan ekonomi besar yang sedang menggeliat bangun diungkap melalui tuduhan sebuah komisi Amerika Serikat - beranggotakan 6 orang dari Partai Demokrat dan 6 orang dari Partai Republik – bahwa China telah melakukan mata-mata melalui internet[5], sebuah upaya efektif dan efisien untuk mengurangi biaya secara signifikan dibandingkan mengirimkan mata-matanya ke Amerika Serikat.

Banyak negara maju yang tidak memiliki tenaga kerja murah dan sumber daya alam memadai mencoba untuk tetap mampu berkompetisi di tingkat dunia melalui pengembangan perekonomian yang didorong inovasi – *innovation driven economy* - dengan alasan banyak jurisdiksi nasional maupun sub nasional di seluruh dunia memikirkan ulang pendekatan-pendekatannya terhadap inovasi dengan kesimpulan bahwa inovasi dan meningkatnya dukungan publik yang signifikan adalah penting sebagai pendorong pertumbuhan.[6] Kita bisa melihat upaya beberapa negara maju yang serius berusaha mencapainya :

a. Inggris sebagaimana dnyatakan oleh Perdana Menteri Tony Blair ingin menjadi pusat pengetahuan utama dalam perekonomian global, dengan reputasi bukan hanya pengetahuan dan penemuan teknologi berkelas dunia, tetapi juga mengubah pengetahuan itu menjadi sebuah produk dan jasa yang baru dan menguntungkan.[7]
b. Arsitektur Institusi kebijakan dan pembuatan keputusan Australia direkomendasikan perlu mencerminkan kenyataan bahwa inovasi – lebih daripada faktor lainnya – akan memainkan peran kritis dalam pengembangan ekonomi masa depan Australia.[8]
c. Desember 2005 European Council menyatakan bahwa inovasi, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan *human capital*, khususnya berkenaan dengan Usaha Kecil dan menengah, adalah penting guna

---

[4] Op.cit., *Rethinking Public Support of Science and Innovation in the National Interest : An Innovation Architecture Approach*, p. 7.
[5] BBC Indonesia Program Siaran pagi, pk. 05-06, 21 November 2008.
[6] Op.cit., *Rethinking Public Support of Science and Innovation in the National Interest : An Innovation Architecture Approach*, p. 15.
[7] DTI Innovation Report, *Competing in the Global Economy : the Innovation Challenge*, December 2003, p. 10.
[8] Op.cit., *Rethinking Public Support of Science and Innovation in the National Interest : An Innovation Architecture Approach*, p. 5.

mencapai tingkat *employment,* produktivitas dan pertumbuhan berkelanjutan yang lebih tinggi di seluruh Uni Eropa, dalam konteks kebijakan makroekonomi.[9]

II. INOVASI

2.1. Inovasi adalah Sistem Non-linier

Inovasi dalam sektor publik pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian inovasi sektor privat, karena tidak bisa dipungkiri manfaat ekonomi inovasi juga diperlukan sektor publik untuk mengembangkan dirinya sebagaimana dalam sektor privat - kecuali ia juga menyangkut masalah sosial:

a. *Innovation is the process of converting knowledge and ideas into better ways of doing business or into new and improved products and services that increase productivity and are of value to the community.*[10]
b. *Innovation is the intersection of invention and insight, leading to the creation of social and economis value.* (Innovate America, National Innovation Initiative Report, Council of Competitiveness, 2004).[11]
c. *Innovation success is the degree to which value is created for customers through enterprise that transform new knowledge and technologies into profitable products and services for national and global markets. A high rate of innovation in turn contributes to more market creation, economic growth, job creation, wealth and a higher standard of living.* (21st Century Working Group, National Innovation Initiative, 2004).[12]

Inovasi dalam kenyataannya bukanlah konsep linier yang sederhana dan ringkas : sekedar ditemukannya ide yang bisa memberikan manfaat komersial, lalu dilemparkan ke pasar guna mengalami difusi, titik. Inovasi adalah konsep kompleks, merupakan sebuah sistem yang multidimensional dan mengglobal dengan banyak faktor, proses dan agen yang terlibat didalamnya, bersifat sosial dan interaktif, dengan banyak bakat, keahlian dan sumber daya yang berbeda dipadukan menjadi satu.[13] Kekomplekan inovasi sebagai sebuah sistem bisa dilihat di bawah ini :

---

[9] David Osimo, et. al., *The E-Public Sector as an Active Partner in the Innovation System, Institute for Perspective Tecnological Studies* – DG JRC – Eiropean Commission, Sevilla, Spain, tanpa tahun, p. 1.
[10] The Department of Tourism, Regional Development and Industry, Queensland Government Submission to the National Innovation Review, April 2008, p. 2.
[11] Op.cit., *Defining "Innovation" : A New Framework to Aid Policymakers*, p. 3.
[12] Ibid., p. 4.
[13] Ibid., p. 2. Lihat juga IDEA Knowledge, *Innovation in Public Services : Literature Review,* September 2005, p. 5-6, dan *Innovation Vital Signs*, p. 3. Lihat juga George Bougias [and] Anand Kulkarni, p. 11dan DTI *Innovation Report*, p. 27.

a. Input inovasi :
   (i) R&D dan pengetahuan – sumber dana untuk R&D bisa pemerintah dan dunia pendidikan. Diseminasi inovasi dilakukan dengan bantuan media masa, juga penerbit, apakah berbentuk jurnal atau buku, dalam tingkat nasional maupun internasional.
   (ii) Talenta – berkaitan dengan manusia yang dididik melalui sistem pendidikan juga pengalaman yang diperoleh melalui perusahaan tempat bekerja, nelum lagi berkaitan dengan budaya di mana seseorang tinggal, baik dlam cakupan nasional maupun internasional.
   (iii) Kapital – akses untuk mendapatkan dana, bisa diperoleh dari pemerintah melalui *public policy* maupun institusi finansial, baik perbankan maupun non perbankan, dalam level nasional maupun internasional.
   (iv) Jaringan – berkaitan dengan komunitas pengetahuan, kolaborasi dengan perusahaan sejenis maupun bukan, hubungan antara institusi publik dan privat, yang bisa menembus level internasional.
b. Proses inovasi :
   (i) Perusahaan yang berinovasi dengan dasar atas permintaan pasar atau bukan, antara lain berkaitan dengan karyawan, pemilik perusahaan, manajer, pelanggan, pemasok, pesaing, distributor, media dan pemerintah. Dengan kata lain semua stakehoder industri, baik dalam level nasional maupun internasional.
c. Output inovasi : juga berkaitan dengan semua stakeholder industri, bisa dalam cakupan nasional maupun internasional.

Sistem inovasi yang kompleks dan multidimensional ini memerlukan keahlian kepemtimpinan dan koordinasi yang tangguh jika ingin berhasil dan tepat bila dilakukan oleh pemerintah melalui public policy, karena pada akhirnya, public policylah yang menentukan banyak lingkungan di mana perusahaan privat bisa menjadi inovatif yang akhirnya akan terakumulasi ke dalam perekonomian yang inovatif :[14] ... *So any successful innovating economy needs mechanisms and institutions to sustain investment over time in capabilities, to manage collaboration, and to cope with risk and uncertainty and their implication for business development.*[15] Selain itu sektor publik juga berperan penting dalam menyediakan infrastruktur yang membantu pemasokan input inovasi bagi perusahaan privat,[16] antara lain infrastruktur teknologi informasi, penyaji

[14] The Economist Intelligence Unit, *Innovation Trnasforming the Way Business Creates*, May, 2007, p. 16.
[15] Op.cit., *Rethinking Public Support of Science and Innovation in the National Interest : An Innovation Architecture Approach*, p. 11.
[16] Op.cit., *Defining "Innovation" : A New Framework to Aid Policymakers*, p. 7.

kapital, pasar dan institusi pendidikan. Senada dengan hal ini, Profesor Jonathan West dan Keith Smith dalam uraiannya kepada *House of Representative Standing Committee on Science Innovation, Inquiry into Pathways to Technological Innovation* di tahun 2005 menyatakan bahwa public policy memiliki peran kunci dalam mengembangkan sistem inovasi yang dinamis dan berhasil, karena inovasi membutuhkan akses kepada lembaga pengetahuan yang dikelola banyak pihak, dan inovasi beroperasi dalam situasi yang penuh resiko dan ketidakpastian yang signifikan.[17]

2.2 Mengembangkan Sektor Publik yang Inovatif

Tidak ada rumus yang pasti tentang bagaimana mengembangkan inovasi dalam sektor publik. Agar menjadi inovatif, sektor publik bisa mengembangkannya sendiri konsep inovasi yang dikembangkannya, diimplementasikan dan dikelola yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada (*home-grown innovation*), beberapa negara Asia, Irlandia, negara-negara Skandinavia dan Israel adalah contoh negara yang berhasil mengembangkan pendekatan inovasi yang berbeda yang mencerminkan sumber daya, kapabilitas dan keahlian serta aspirasi yang unik.atau bisa juga mengadopsi inovasi yang sukses dari negara lain[18] - atau melakukan *benchmarking*[19] *innovation*. Ketika sektor publik memutuskan melakukan benchmarking innovation, maka ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu[20] :

a. apakah inovasi yang akan diadopsi tersebut benar-benar berhasil?
b. apakah inovasi yang akan diadopsi mungkin untuk ditransfer ke negara lain?
c. apakah negara pengadopsi memiliki kapasitas instritusional dan manajerial untuk mengadopsi dan mengimplementasikannya?

Untuk melakukan benchmarking dengan tiga syarat di atas, sektor publik harus memiliki tim sumber daya manusia yang berkualitas tinggi agar nampu mengevaluasi inovasi mana yang sesuai dengan negaranya. Hal ini

---

[17] Op.cit., *Rethinking Public Support of Science and Innovation in the National Interest : An Innovation Architecture Approach*,p. 14.

[18] Guido Bertucci, *Innovation in Government Around the World : Challenges and Perspectives*, Fifth Global Forum on Reinventing Government, Innovation and Quality in the Government of 21th Century, Mexico, November 2003, p. 6.

[19] Konsep benchmarking adalah konsep dalam pemasaran yang memiliki arti menyimak dari sumber yang hebat untuk kemudian mengadopsi hal-hal yang positif darinya.

[20] Loc.cit., *Innovation in Government Around the World : Challenges and Perspectives.*

dikarenakan tiga syarat tersebut menunjukkan kompleksitas yang rumit karena melibatkan banyak pihak dan sektoral serta membutuhkan keahlian multidimensional yang kompleks, seperti dimensi ilmu budaya, sosial, politik, ekonomi, dan psikologi (termasuk di dalamnya pemasaran), belum lagi ilmu pengetahuan alam yang saat ini sedang berkembang dikarenakan kemajuan teknologi informasi, baik dalam memahami inovasi negara-negara yang akan dibenchmarking maupun memahami situasi dan kondisi negaranya sendiri, khususnya ketika terdapat perbedaan yang besar antara situasi dan kondisi negara-negara yang akan dibenchmarking dengan negaranya.

2.3 Pengalaman Universal Inovasi Sektor Publik

Dari pengalaman menerapkan inovasi di sektor publik di seluruh dunia lebih dari dua dasawarsa, paling tidak ada enam komponen yang bersifat universal, walau ada perbedaan yang terjadi antar negara dalam hal : sejarah, sistem elektoral maupun tahap pertumbuhan negara. Sebagai upaya untuk mengembangkan inovasi, enam komponen ini layak untuk dipelajari[21] :

1. **Pengurangan biaya pemerintah.**
   - Perubahan besar yang terjadi untuk mengurangi biaya sektor publik adalah penerapan konsep produktivitas yang antara lain meliputi penerapan konsep *performance based budgeting.*
   - Dalam budgeting ini, tujuan sektor publik yang seringkali bersifat kualitatif harus mampu dikuantifikasikan, terbukti berhasil dilakukan di New Zealand.
   - Inti dari pengurangan biaya sektor publik terletak kepada pemberian *reward* kepada para pegawainya yang mampu menghemat biaya negara yang dilakukan melalui penciptaan atmosfir organisasi yang berasal dari atas ke bawah. Singapura beberapa tahun yang lalu ketika mengalami krisis finansial, memotong gaji para pegawai negari yang justru dimulai dari para pucuk pimpinan negara sebagai teladan. Hal ini bisa terjadi ketika pemimpin mampu untuk merangkul semua pihak demi mencapai tujuan.
   - Beberapa negara yang menekan biaya sektor publiknya antara lain Singapura, Perancis, Canada, Mexico dan Chili.

---

[21] Elaine C. Kamarck, *Government Innovation Around the World,* John F. Kennedy School of Government, Harvard University, November 2003, p. 3 dan p. 15-43.

2. **Kualitas pemerintah.**
   - Kualitas pemerintah dalam tulisan ini dibatasi kepada upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dengan tujuan membangun dukungan publik dan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, dua hal yang dirasakan penting dalam membangun *innovation driven economy.*
   - Beberapa gerakan penting berkaitan dengan kualitas pemerintah ini antara lain (a) "one-stop-shop" di mana individu atau pebisnis melakukan semua transaksinya dengan pemerintah di bawah satu atap, (b) melakukan interaksi dengan warganegara untuk mengetahui apa yang warganegara inginkan dan harapkan dari pelayanan pemerintah, (c) mengijinkan warganegara memberikan input untuk membentuk organisasi dan perilaku birokratik, (d) menyebarluaskan kepada publik standar apa yang ingin dicapai pemerintah, (e) melibatkan karyawan dalam meredesain organisasi, dan (f) memberikan pelatihan kepada pegawai negeri guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen.
   - Upaya meningkatkan kualitas pemerintah ini pada intinya memerlukan komitmen yang tinggi dari para *public servant* untuk ***melayani***, bukan menjadi raja-raja kecil ketika menghadapi para 'pelanggannya'. Tampaknya perlu ada perenungan mendalam dan pemahaman akan makna *public servant.* Dalam kasus tertentu diketahui 'arogansi' sektor publik dalam melayani 'pelanggannya' adalah tinggi, terutama ketika ia memegang monopoli.
   - Inggris di tahun 1980an merupakan negara pertama yang mampu memiliki kualitas pemerintah baik, disusul oleh Amerika Serikat di tahun 1990an. Negara lainnya antara lain Portugal, Irlandia, Filipina. Australia dan Afrika Selatan.
   - Pencapaian kualitas ini dibakukan melalui ISO 9000 yang menjadi rujukan bagi banyak negara, walaupun faktor budaya bisa menjadi penghambat untuk pencapaian maupun pelaksanaan standar ini.

3. **Pemerintah yang Profesional**
   - Ada beberapa masalah yang dihadapi pemerintah berkaitan dengan upaya meningkatkan keprofesionalannya, yang seringkali kalah dibandingkan dengan profesionalisme sektor privat, antar lain : (a) banyak kasus menunjukkan kalau pegawai negeri banyak yang tidak sebagus kualitasnya dibandingkan sektor privat. Kemungkinan hal ini dikarenakan gaji pegawai negeri tidaklah sebesar gaji di sektor

privat, sehingga kurang menarik orang-orang berbakat untuk masuk di dalamnya. Karena itu tidaklah heran, dalam beberapa kasus, jika yang mengisi jajaran pemerintahan adalah orang-orang berkualitas kelas dua, (b) dana pemerintah yang dikeluarkan untuk melakukan pelatihan bagi karyawannya tidaklah sebesar sektor privat, (c) dalam beberapa kasus, tingkat *turn over* pegawai negeri adalah tinggi, sehingga sulit untuk menjadikan sektor publik menjadi mantap, dan (d) kecilnya gaji pegawai negeri seringkali dituding sebagai biangnya bermunculan bibit-bibit korupsi yang terjadi, baik di negara maju maupun di negara berkembang, walaupun ada faktor lain menjadi penyebab timbulnya korupsi, yaitu supremasi hukum yang rendah.

- Upaya yang dilakukan beberapa negara untuk meningkatkan profesionalitas pegawainya antara lain : (a) mengurangi diskrepansi gaji sektor publik dengan swasta, (b) mereformasi aturan dan regulasi pelayanan publik yang sudah usang, dan (c) melembagakan pembayaran gaji berdasarkan kinerja.
- Mengurangi diskrepansi gaji sektor publik dengan privat bisa menjadi solusi untuk meningkatkan keprofesionalan sektor publik selama etos kerja pimpinan dan karyawan dalam sektor publik adalah tinggi, baik sektor publik memegang monopoli atau tidak.

4. Digital Government

- Dengan berkembangnya teknologi informasi yang membantu mengembangkan bisnis sektor privat, banyak pemerintah juga memanfaatkannya. Di tahun 1996 hanya kurang dari 50 situs pemerintah yang tersedia di dunia, sementara di tahun 2001 ada lebih dari 50.000 situs di seluruh dunia – di mana sebanyak 22.000 situs di antaranya milik pemerintah Amerika Serikat.
- Banyak negara sedang berkembang hanya sekedar memberikan informasi (to inform) negaranya kepada orang-orang di luar negaranya, sejak akses internet warganegaranya rendah, karena teknologi internet masih cukup mahal untuk bisa dijangkau banyak warganegaranya.
- Situs beberapa negara maju dan sedang berkembang dikategorikan sebagai situs interaktif yang memungkinkan warganegaranya mengakses mendapatkan informasi dari pemerintahnya, walau transaksi *online* belum bisa dilakukan.
- Beberapa situs negara maju dikategorikan masuk dalam tingkat transaksional, sejak transaksi warganegara dengan sektor publik bisa dilakukan secara *online*.

- Sektor publik yang mampu menggabungkan *digital government* dengan memfokuskan diri kepada warganegaranya sebagai pelanggan secara substansial mampu menghemat biaya, khususnya bagi investor asing yang cenderung alergi terhadap birokrasi pemerintahan yang rumit, lamban dan membebaninya secara ekonomi, dan memberikan pelayanan yang lebih baik, selain juga memberikan transparansi kepada warganegaranya – hal yang penting upaya memerangi korupsi. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, regulasi sektor publik diungkap dalam internet yang membolehkan warganegara mengomentarinya
- Sebuah hasil penelitian tentang teknologi informasi dalam sektor publik menunjukkan kesimpulan bahwa efisiensinya akan terkait dengan pengurangan biaya tenaga kerja dan kepada kecepatan hubungan dengan apa yang diminta 'pelanggannya'.[22]

5. **Pemerintahan yang diregulasi lebih baik.**
   - Mengkalkulasi regulasi yang membebani ekonomi adalah tahap pertama dalam menciptakan regulasi yang efektif, karena umumnya individu atau sektor privat yang menanggung biaya regulasi tersebut. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu, di Argentina diperlukan 71 hari kerja untuk mendapatkan ijin mendirikan usaha baru. Di negara tertentu, hal ini dibarengi dengan biaya yang seringkali tidak masuk akal, biaya yang sering disebut sebagai biaya siluman yang pada akhirnya biaya tersebut dibebankan kepada 'konsumen' yang mengakibatkan harga jual produk sektor privat tersebut tidak bisa bersaing, justru di dalam negeri, dengan produk impor yang menetapkan harga *dumping*. Hal ini membuat banyak pengusaha, baik lokal apalagi asing, tidak tertarik membuka usaha di negara tersebut.
   - Di negara-negara maju, reformasi regulasi cenderung menjadi lebih sederhana agar biaya regulasi menjadi rendah. Di tahun 2002, para pemimpin Uni Eropa berhasil mengurangi kuantitas regulasi Uni eropa sebesar 40%.
   - Regulasi sektor publik berkaitan juga dengan regulasi lingkungan yang semakin mengglobal pengaruhnya. *Climate Change* yang sekarng mulai dirasakan di banyak belahan dunia memerlukan koordinasi yang lebih efektif dari negara-negara di seluruh dunia, agar bencana hebat sebagaimana diramalkan banyak ahli tidak terjadi.

---

[22] Ian Miles, *Public Sector Innovation – Issues from Innovation Studies*, Notes for PUBLIN Project Preparation, CRIC & PREST, University of Manchester, November 2001, p. 10.

6. **Pemerintahan yang Jujur dan Transparan.**
   - Negara yang kecenderungan korupsinya tinggi akan tetap miskis terus, karena beberapa alasan, antara lain (a) dana yang dipinjam dari luar negeri tidak dipakai untuk pembangunan negara, tetapi diparkir di bank-bank Swiss dalam rekening pribadi, (b) negara yang tingkat korupsinya rendah, jujur, transparan, mentaati hukum akan lebih mudah didatangi oleh *Foreign Direct Investment* (FDI). FDI yang dilakukan oleh perusahaan multi nasional akan memberikan beberapa manfaat bagi negara yang mendapatkan investasi tersebut, yaitu antara lain penularan pengetahuan teknologi dan teknik-teknik manajemen yang bagus, karena perusahaan multi nasional dianggap sebagai pemimpin dalam menghasilkan inovasi bagi produk-produk komersial yang signifikan, termasuk teknologi baru, produk baru dan bentuk organisasi baru.[23]
   - Beberapa cara bisa menjadi upaya untuk mengurangi tingkat korupsi, seperti (a) menciptakan "budaya informasi" di antara warga negaranya, agar mereka menyadari memiliki hak atas informasi dari sektor publik, (b) mendorong aturan dan menghukum koruptor seperti China dengan eksekusi matinya, dan (c) mengevaluasi akar korupsi dan melakukan deregulasi dan penyederhanaan proses sektor publik.

III. HAMBATAN INOVASI DI SEKTOR PUBLIK

Dalam upaya mengembangkan inovasi sektor publik, penting untuk memahami hambatan apa saja yang ada agar pengembangan sektor publik bisa berjalan lebih lancar inovasi, tidak terhambat sebagaimana yang pernah mengalaminya, yaitu :

1. Kekakuan, hirarki dan rutinitas yang ada dalam birokrasi sektor publik menjadi hambatan bagi inovasi[24], karena inovasi harus dihadapi dengan kreativitas dan kemampuan untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan. Kekakuan dan rutinisasi berlanjut menghambat pengembangan pemimpin yang efektif dalam sektor publik, karena ia membatasi otonomi manajemen dan kepemimpinan[25]. Berdasarkan survei *Federal Public Service Employee* yang dilakukan di Kanada tahun 1999, diketahui bahwa kurang

---

[23] Lakhwinder Singh, *Globalization, National Innovation System and Response of Public Policy*, MPRA Paper no. 641, November 2006, p. 8.
[24] Nada Teofilovic, *The Reality of Innovation in Government*, tanpa tahun, p. 2.
[25] Ibid., p. 26.

dari setengah pegawai negeri merasa bahwa mereka didorong menjadi inovatif atau mengambil inisatif, memiliki suara dalam keputusan dan tindakan yang mempengaruhi pekerjaan mereka, mendapat bantuan dari pemimpinnya atau departemen dalam menentukan kebutuhan akan pelatihan atau dukungan pengembangan karir atau memiliki promosi atau yakin bahwa mereka memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan promosi. Hanya 37% dari mereka yang berfikir manajemen senior akan mencoba memecahkan permasalahan yang mereka hadapi ini.[26]

2. Dalam sektor privat, tujuan yang ada mudah untuk diukur karena bisa dikuantifikasi terutama melalui pendekatan balanced score card, sementara dalam sektor publik, banyak tujuan yang sulit untuk diukur karena sifanya kualitatif.[27] Dengan demikian, inovasi dalam sektor publik adalah lebih sulit dibandingkan di sektor privat, walaupun beberapa kasus menunjukkan keberhasilan mengkuantifikasikan tujuannya.
3. Insentif untuk berinovasi bagi organisasi sektor publik dan karyawannya kecil dan resiko yang dikaitkan dengan inovasi adalah tinggi.[28] Inovasi adalah konsep yang berkaitan dengan perubahan lingkungan : membuang peraturan lama dan pola-pola kerja rutin dan memperkenalkan hal-hal dan standar-standar baru.[29] Hambatan ini akan semakin diperparah dengan budaya yang enggan menghadapi resiko, apalagi banyak perusahaan negara yang memiliki monopoli, sehingga upaya untuk berinovasi menjadi minim. Kondisi monopoli membuat publik tidak bisa berbuat apa-apa walaupun merasa tidak puas dengan kinerja sektor publik. Dengan semakin meningkatnya 'melek politik' melalui diseminasi demokrasi, publik bisa semakin menyuarakan kepentingannya terhadap sektor publik – inipun jika publik diberikan hak untuk bersuara sebagai salah satu hak asasi manusianya.
4. Korupsi yang tinggi di beberapa negara sedang berkembang – yang bahkan menjadi hal yang lumrah dalam kasus tertentu – akan menyebabkan tingkat pengeluaran yang rendah untuk pendidikan, hal yang amat berbahaya bagi negara yang ingin berkembang dalam era ekonomi global, karena sumber daya manusia yang penuh bakat menjadi sangat terbatas. Padahal, motor inovasi adalah kreativitas individu/entrepreneur. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan akan menghasilkan sumber daya

---

[26] Ibid., p. 21.
[27] Rifka Weehuizen et.al., *Innovation in the public sector – an analytical framework and empirical evidence from Europe and beyond,* tanpa tahun, p. 1.
[28] Op.cit., *Innovation in Public Services : Literature Review,* p. 2.
[29] Pradip Sinha, *Survival Strategies : nnovate or Die,* Economics Web Institure, 2004, p. 2.

manusia yang rendah kemampuannya dalam berhadapan dengan resiko dan perubahan, padahal saat ini banyak negara – bahkan maju - yang menganggap penting memiliki akses atas ide-ide baru dari seluruh dunia.

5. Sebagai akibat dari hambatan-hambatan di atas adalah rendahnya kemampuan kepemimpinan dan koordinasi untuk mengupayakan inovasi yang lintas sektoral dan dimensi, apalagi ditunjang oleh rendahnya insentif yang ada, sedikitnya dana pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kebiasaan berada dalam situasi monopoli yang berlangsung lama. Padahal pemimpin sangat berperan penting dalam mengembangkan budaya organisasi yang inovatif.

III. PENUTUP

Invoasi di sektor publik yang telah menjadi sebuah fenomena global saat ini sudah menjadi suatu keharusan bagi negara yang ingin terus dipertimbangkan posisinya dalam panggung politik dan ekonomi global, berkaitan dengan banyaknya tuntutan dari dalam negeri – antara lain memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan penigkatan kesejahteraan warganegaranya - maupun dari luar negeri, antara lain seperti banyak bisnis internasional yang menuntut agar negara memberikan kredibilitas dan reliabilitas dalam melayani bisnis internasional – terlihat dari kesimpulan survei World Bank tahun 1997 pada 3.600 perusahaan bisnis internasional yang menyatakan adanya hubungan yang kuat antara kinerja ekonomi dengan fungsi pemerintah yang reliabel, dan ungkapan Thomas Friedman bahwa selama sebuah negara mampu memberikan sistem operasi dan piranti lunak yang mampu menjaga hak milik privat, maka tidak penting apa warna sebuah negara bagi sebuah perusahaan bisnis[30].

Inovasi selama penerapannya lebih dari dua dasawarsa di seluruh dunia sudah terbukti menjadi senjata pamungkas negara dalam berkompetisi dengan yang lainnya. Negara manapun yang ingin memampukan diri atau mengembangkan inovasi bisa melakukannya dengan bebas, selama ia mampu mengikuti persyaratan yang ada. Inovasi bukan monopoli Barat, karena banyak negara Asia yang terbukti sukses dalam panggung perekonomian global berkat inovasi :

---

[30] Op.cit., *Government Innovation Around the World*, p. 11-12.

(a) Jepang adalah salah satu dari empat negara – Swiss, Amerika Serikat dan Swedia – top dunia dalam berinovasi,[31] belum lagi Taiwan dan Singapura, yang sampai saat ini masih diakui emnjadi salah satu negara ekonomi besar dunia.
(b) China terbukti menjadi negara yang memiliki cadangan devisa terbesar di dunia berkat inovasinya – suatu hal yang unik bagi sebuah negara komunis yang menganut perdagangan liberal yang mampu melakukan *leapfrogging* hanya dalam kurun waktu singkat.
(c) Bersama China India, yang merupakan dua kekuatan besar di Asia, juga dianggap melakukan *leapfrogging* – perubahan yang sangat cepat – yang diakui hanya bisa dicapai melalui *innovation driven economy develoment strategy.*[32] Visinya adalah *by 2020, the people of India will be more numerous, better educated, healthier and more prosperous than at any time in our long history.*

Untuk mencapai innovation driven economy, peran sektor publik, dalam hal ini adalah pemerintah, tidak lagi hanya sekedar diperlukan menjadi fasilitator atau regulator, tetapi menjadi sangat mutlak mengkoordinasi semua sub sistem yang ada dalam sistem inovasi. Karenanya tidaklah heran jika ia mulai harus berperan sebagaimana perusahaan privat yang berorientasi kepada profit yang kemudian digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Daftar Pustaka

BBC Indonesia Program Siaran pagi, pk. 05-06, 21 November 2008.

Bertucci, Guido, *Innovation in Government Around the World : Challenges and Perspectives*, Fifth Global Forum on Reinventing Government, Innovation and Quality in the Government of 21th Century, Mexico, November 2003.

Bougias, George, [and] Anand Kulkarni, *Rethinking Public Support of Science and Innovation in the National Interest : An Innovation Architecture Approach, submission to the Productivity Commission on the issue of Public Policy Support for Science and Innovation in Australia,* 2006.

[31] Op.cit., *Innovation Trnasforming the Way Business Creates*, p. 12.
[32] Op.cit., *Rethinking Public Support of Science and Innovation in the National Interest : An Innovation Architecture Approach*, p. 7.

DTI Innovation Report, *Competing in the Global Economy : the Innovation Challenge,* December 2003.

IDEA Knowledge, *Innovation in Public Services : Literature Review,* September 2005.

Innovation Vital Signs, *Defining "Innovation" : A New Framework to Aid Policymakers,* 2006.

Kamarck, Elaine C., *Government Innovation Around the World,* John F. Kennedy School of Government, Harvard University, November 2003.

Miles, Ian, *Public Sector Innovation – Issues from Innovation Studies,* Notes for PUBLIN Project Preparation, CRIC & PREST, University of Manchester, November 2001.

Osimo, David, et. al., *The E-Public Sector as an Active Partner in the Innovation System,* Institute for Perspective Tecnological Studies – DG JRC – European Commission, Sevilla, Spain, tanpa tahun.

Singh, Lakhwinder, *Globalization, National Innovation System and Response of Public Policy,* MPRA Paper no. 641, November 2006.

Sinha, Pradip, *Survival Strategies : Innovate or Die,* Economics Web Institure, 2004.

The Department of Tourism, Regional Development and Industry, *Queensland Government Submission to the National Innovation Review,* April 2008.

The Economist Intelligence Unit, *Innovation Trnasforming the Way Business Creates,* May, 2007.

Teofilovic, Nada, *The Reality of Innovation in Government,* tanpa tahun.

Weehuizen, Rifka, et.al., *Innovation in the public sector – an analytical framework and empirical evidence from Europe and beyond,* tanpa tahun.